

Posts Tagged 'Robi Cahyadi Kurniawan'

Elite dan Pilgub Lampung

Published Agustus 9, 2012 Artikel Pengamat

Ditutup

Tag:Elite dan Pilgub Lampung, Robi Cahyadi Kurniawan

Oleh **Robi Cahyadi Kurniawan**

Kondisi politik Lampung saat ini sudah mulai menghangat dengan isu pelaksanaan pemilihan Gubernur Lampung periode 2014—2019. Isu dimulai dari apakah gubernur masih dipilih langsung ataukah dipilih legislatif (DPRD provinsi) seperti yang diajukan dalam draf UU Pemilukada versi Kementerian Dalam Negeri.

Isu kemudian berkembang dengan wacana kapan sebaiknya pelaksanaan Pilgub Lampung. Pilihannya hanya dua, yakni tahun 2013 (sebelum Pilpres 2014) atau tahun 2015 (sesudah pilpres), atau ada pilihan akomodatif dan negosiasi lain. Isu kemudian bergulir dengan wacana siapakah yang pantas memimpin Lampung periode mendatang? Sebab, Lampung termasuk provinsi termiskin di Indonesia, maka tipe pemimpin transformatif yang dibutuhkan Lampung ke depan.

Banyak sudah tokoh yang secara terang-terangan menyatakan diri siap memimpin Lampung. Banyak juga yang masih malu-malu kucing, wait and see, atau mencari dukungan untuk maju. Semua tokoh itu dalam teori politik adalah para elite yang mempunyai kekuasaan dengan beragam aspek latar belakang, politisi, birokrat, pengusaha, dan tokoh masyarakat.

Tipe Elite

Elite adalah sekumpulan orang yang terpandang dari struktur sosial dan menguasai serta mendominasi massa tertentu dalam aspek atau bidang khusus dalam sebuah sistem. Kondisi yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang mampu mendominasi massa, dibagi oleh beberapa tipe. Tipe pertama, dominasi tradisional, yang didapat berdasar tradisi yang berlaku dalam masyarakat. Kepatuhan yang didasarkan bukan pada kepatuhan hukum formal, tetapi pada konvensi yang terbentuk menurut tradisi yang berlaku.

Dalam dominasi tradisional terdapat massa dengan kepercayaan yang mapan terhadap kesucian tradisi. Hal ini memunculkan massa yang mengakui keunggulan individu tertentu berdasar keyakinan bahwa individu tersebut secara tradisi memang memiliki keunggulan. Ia terpilih bukan karena kharisma atau kemampuannya, melainkan karena kesepakatan bersama yang sudah mentradisi.

Tipe kedua, dominasi kharismatik, yang didapat berdasar karisma yang melekat pada diri seseorang atau sekelompok orang. Bersumber pada daya tarik pribadi yang ada pada individu elite. Weber mendefinisikan kharisma sebagai sifat tertentu dari kepribadian seseorang sehingga orang tersebut

dianggap luar biasa dan diperlakukan sebagai seseorang yang memiliki sifat gaib, unggul, serta kekhasan tersendiri.

Tipe ketiga, dominasi legal rasional, yang didapat dari kesepakatan anggota masyarakat terhadap seperangkat peraturan yang diundangkan secara resmi. Elite diakui karena kemampuan dan memenuhi persyaratan menurut aturan yang berlaku. Hubungan massa dan elit bersifat impersonal, tidak ada kesetiaan yang bersifat pribadi dari massa terhadap elite.

Kepribadian Elite

Di samping mengidap sifat yang tidak mau kalah atau mau menangnya sendiri; para elite politik juga menampilkan ciri kepribadian yang tidak matang. Paling tidak ada tiga ciri utama yang dapat dijadikan rujukan untuk menilai apakah mereka memiliki kepribadian yang matang atau tidak. (Ben Agger, 2003).

Kepribadian yang matang antara lain ditandai dengan, pertama, kemampuan individu mencapai perluasan diri *extention of the self*, yang menjadikan seseorang tidak hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, juga mampu menaruh perhatian pada kepentingan orang lain.

Kedua, tidak matangnya kepribadian elite juga tercermin dari ketidakmampuannya mencapai penerimaan diri *self acceptance* yang objektif yang memungkinkan individu merasa aman secara psikologis, merasa aman secara emosional, dan mampu menerima realitas dengan objektivitas tinggi. Dalam psikologi, perilaku semacam ini dikenal dengan istilah kepribadian yang menganggap segala kesalahannya disebabkan pihak lain yang berkuasa *powerful others*.

Ketiga, ciri ketidakmatangan kepribadian elite juga tampak pada rendahnya derajat kesehatan mental *healthy personality*, yang menjadi prasyarat untuk mampu menjalin hubungan yang hangat dengan pihak lain.

Perilaku politik elite, di samping dipengaruhi oleh faktor kepribadian juga ditentukan faktor motivasi yang mendasari perilaku serta sikap politiknya yang dibangun atas sistem nilai selama hidupnya.

Teori motivasi yang dikembangkan Hebb (1987), menjelaskan motivasi terbentuk jika terjadi adanya ketidakseimbangan (kesenjangan) antara apa yang diharapkan dan kenyataan yang dihadapi. Stimulus yang diterima individu dari lingkungan akan menciptakan pola-pola neural tertentu *neural pattern* melalui proses belajar.

Proses belajar yang meninggalkan bekas pada serabut saraf organisme dan membentuk pola-pola neural yang memengaruhi terbentuknya sistem harapan dalam diri individu kemudian dipertemukan dengan fakta konkret melalui persepsinya.

Penelitian Browning dan Jacob (1992) memang menunjukkan bahwa para politisi umumnya memiliki ciri pribadi yang kuat dalam motif untuk berkuasa dan motif berprestasi. Namun, umumnya politisi yang sukses bukan hanya mengandalkan pada motif untuk berkuasa dan motivasi berprestasi. Kedua motif tersebut dibarengi dengan perilaku politik yang dibangun atas landasan nilai-nilai universal yang kokoh.

Penjelasan Mc. Farland (1969) bahwa di Indonesia politisi yang memiliki pengaruh dan kekuasaan, yang dapat bersumber dari ekonomi, kekerabatan atau patron klien sejarah terdahulu, tetap mendapat tempat dalam partai politik. Orang-orang tua dalam konsep adat ketimuran dianggap memiliki kharisma dan unsur pemikat bagi partai dalam menggaet kader.

Fenomena Jokowi

Sepatutnya para elite di Lampung mulai berbenah menghadapi pilgub mendatang. Pembinaan dimulai dari manajemen diri pribadi, menyingkirkan sejenak "nafsu" berkuasa yang terlalu berlebihan karena menyebabkan akal dan budi terpinggirkan.

Lampung memang bukan DKI Jakarta yang telah menghasilkan sosok mengejutkan lewat kehadiran Jokowi dan Ahok. Tetapi fenomena Jokowi telah menjadi magnet dan tolok ukur tersendiri dalam pelaksanaan pilgub. Jokowi merupakan alat perlawanan warga Jakarta terhadap kepemimpinan sebelumnya yang mungkin mereka anggap gagal.

Fenomena Jokowi mempuskan dan menghantam kinerja lembaga survei dengan memutarbalikkan hasil survei, mematahkan teori petahana yang lebih berpeluang besar memenangi pemilu. Jokowi juga telah mematahkan sekat-sekat arogansi penguasa dengan gaya kampanye yang elegan, sederhana, dan menyentuh masyarakat pinggiran Jakarta.

Apakah Lampung akan mencari sosok seperti Jokowi? Siapakah tokoh itu? Ataukah warga Lampung sepakat bahwa tokoh-tokoh yang ada saat ini sudah berkualitas sama atau lebih baik dibandingkan Jokowi-Ahok? Ataukah warga Lampung lebih senang memilih siapa pun tokohnya asalkan Lampung menjadi lebih baik di masa datang? Akan kita lihat sebentar lagi, 2013 atau 2015. (Sumber: Lampung Post, 8 Agustus 2012)

Tentang penulis:

[Robi Cahyadi Kurniawan, dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung](#)



Iklan



Media dan Pemilu

Published Juli 30, 2012 Artikel Pengamat

Ditutup

Tag:Media dan Pemilu, Robi Cahyadi Kurniawan

Oleh **Robi Cahyadi Kurniawan**

Penerapan media dalam kampanye pemilihan umum di era informasi dewasa ini memegang peranan sangat penting. Media dapat menyampaikan materi kampanye, profil kandidat, serta gambaran partai kepada khalayak. Kampanye tanpa media massa tidak akan efektif karena jarak jangkauan yang terlalu jauh.

Abraham Lincoln menang pemilu dengan memanfaatkan media cetak pada masa itu. Penyebaran koran yang luas dan pemuatan profil dirinya secara terus-menerus telah meningkatkan popularitas dan kepercayaan publik terhadap Lincoln. Hasilnya, dengan perolehan suara yang besar ia terpilih menjadi presiden Amerika Serikat.

Sebelum penemuan televisi, radio juga telah digunakan dalam kampanye. Presiden Nixon dan Kennedy memanfaatkan televisi dalam kampanye mereka. Sikap politik, mimik wajah, gambaran akan profil diri, akan dapat dengan mudah ditangkap pemirsa televisi untuk memberikan gambaran kognitif tentang seorang kandidat dalam media televisi. Perilaku kandidat, yang

terinterpretasi melalui senyuman, jabatan tangan, menggendong seorang anak, mengunjungi panti asuhan/jompo, menanam pohon misalnya, merupakan sedikit dari gambaran yang dapat dilihat dari televisi yang dapat merespons sikap pemilih.

Kampanye pemilihan presiden dari Partai Demokrat Amerika antara Barack Obama dan Hillary Clinton juga kental dalam nuansa penggunaan teknologi. Obama tercatat sebagai calon kandidat yang paling banyak menggunakan internet.

Di Indonesia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggunakan media musik untuk menarik simpati publik. Lagu Pelangi di Matamu yang sering dinyanyikan selama kampanye 2004 terbukti efektif dalam setiap kampanye. Jurus ini kembali dipakai dengan pembuatan album-album lagu pop ciptaan beliau untuk persiapan kampanye Pemilu 2009. Hasilnya cukup ampuh untuk mempertahankan popularitas dirinya. Ruang publik kita saat ini dipenuhi beragam poster, baliho, dan spanduk kandidat. Para calon bupati di tiga kabupaten, Tulangbawang, Tanggamus, dan Lampung Barat, juga melakukannya.

Bahasa Media

Pengaruh media terhadap kampanye disebabkan persepsi penggunaan bahasa. Bahasa yang digunakan seseorang menentukan sifat dan pikirannya. Ini berarti sebenarnya struktur realitas yang disajikan kepada seseorang sangat dipengaruhi bahasa.

Setiap media massa memiliki gramatika, yaitu aturan kerja yang berkaitan erat dengan gabungan indera (penglihatan, sentuhan, suara, penciuman, rasa/kecapan). Setiap gramatika media dibiaskan untuk kepentingan indera tertentu. Jadi dapat dikatakan media sebagai perpanjangan indera manusia akan berdampak amat kuat bagi penggunaannya, semisal dalam kampanye.

Media juga dapat memenuhi kebutuhan manusia akan interaksi sosial selama kampanye. Syarat dapat tercapai jika media massa memberi peluang bagi hubungan parasosial, yaitu melibatkan orang kedalam sebuah keakraban hubungan tanpa terjadinya hubungan langsung. Ini digunakan oleh para komunikator politik untuk membangun sebuah jembatan untuk menghubungkan pemimpin politik atau para calon kandidat dan pengikut (konstituen). Peran juru kampanye dengan menggunakan media diperlukan untuk menjalin ikatan emosional antara publik dan calon.

Tak dapat dimungkiri media juga dipengaruhi faktor industri (industri media) sehingga isu yang diusung pun berbeda-beda. Perbedaan serta pertarungan isu di media ikut menentukan opini yang diciptakan untuk dikonsumsi publik sehingga setiap media mengusung ideologi yang berbeda-beda. Perbedaan ini sah saja dan menjadi tempat untuk memperoleh informasi sebanyak-banyaknya bagi pemilih untuk menentukan pilihan terbaiknya.

Hill & Sen (2000: 1-17) menyatakan media massa berupa koran, radio, dan televisi merupakan bentuk revolusi komunikasi pada masanya masing-masing. Media juga dapat berbentuk buku, sinema nasional, industri musik, dan internet. Internet juga disebut sebagai virtual politics. Media menggambarkan

budaya sebuah komunitas tertentu yang mendiami sebuah wilayah sehingga dapat memengaruhi aspirasi politik dari komunitas tersebut.

Kode Etik

Media berfungsi menciptakan persuasi politik, yakni transaksi kreatif kepada komunikan (penerima pesan) yang menyusun tanggapan terhadap simbol yang diberikan persuader (pemberi/penyampai). Media berperan untuk membentuk persepsi berupa citra politik tertentu dari kandidat. Juga menyebarluaskan pembicaraan politik untuk menggiring opini publik yang akan meningkatkan popularitas dari kandidat.

Media memiliki peran sentral dalam kampanye. Fungsi media selain memberikan informasi juga dapat menggiring opini publik untuk menilai, memperhatikan dan memilih kandidat tertentu dalam kampanye. Dengan demikian, alam kognitif publik akan merekam dan akhirnya mengambil sebuah keputusan politik berdasarkan proses pengolahan berpikir.

Namun, hendaknya media tidak terlibat dalam intrik politik praktis yang terlalu dalam. Koridor etika/kode etik media menjadi tembok untuk meredam cara-cara berkampanye yang tidak elok, misalnya dengan melakukan kampanye hitam. Di sinilah amanah media terlihat sebagai sarana untuk memberikan informasi yang lengkap, tepat, dan dapat dipercaya, serta pendidikan politik bagi publik. (Sumber: Lampung Post, 26 Juli 2012).

[Tentang penulis:](#)

[Robi Cahyadi Kurniawan, Dosen FISIP Universitas Lampung.](#)



Isu Etnis dalam Pemilukada

Published Juli 12, 2012 Artikel Pengamat

Ditutup

Tag: Karikatur, Isu Etnis dalam Pemilukada, Robi Cahyadi Kurniawan

Oleh Robi Cahyadi Kurniawan

Isu etnis sebagai komoditas politik masih kerap terjadi. Pemilihan isu yang diusung pun semakin canggih. Semula diharapkan pembauran beragam etnis dengan sendirinya akan mengaburkan isu tersebut.

Tetapi sebagian masyarakat kita masih hidup di wilayah perdesaaan yang bersifat homogen dan sangat peka pada isu identitas sosial mereka. Isu tentang etnis Jawa dan Lampung kembali menjadi perbincangan hangat menjelang pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) di Tanggamus, Tulangbawang, dan Lampung Barat pada September 2012 mendatang.

Secara teoritis etnis dapat menjadi persoalan serius dalam pemilukada. Upaya politisasi dengan maksud menyamakan persepsi anggota/perkumpulan etnis yang seragam dengan memakai baju etnisitas bisa menjadi sumber masalah. Kisruh pemilukada sebagai contoh nyata dari perilaku ini. Contohnya, kasus kekerasan dalam rencana pembentukan Provinsi Tapanuli Selatan, yang

berujung anarki. Jatuhnya korban dalam demonstrasi anarki mengindikasikan isu etnis masih menjadi senjata mematikan jika dibumbui politik praktis.

Ragam Definisi

Etnik berarti kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu karena keturunan, adat, agama, bahasa, dan sebagainya. Anggota-anggota suatu kelompok etnik memiliki kesamaan sejarah (keturunan), bahasa, sistem nilai, adat, dan tradisi.

Menurut Giddens (2002 :246), etnis berkenaan dengan praktek budaya dan cara pandang oleh sebuah komunitas tertentu yang menyatukan mereka. Perbedaan karakteristik membedakan satu etnis dan etnis lain yang terlihat dari bahasa, sejarah, leluhur (nyata atau imajinasi), agama, gaya berpakaian serta cara berdandan dan perhiasan. Frederich Barth (1988) menambahkan istilah etnik menunjuk pada kelompok tertentu yang karena kesamaan ras, agama, asal-usul bangsa, ataupun kombinasi dari kategori tersebut terikat pada sistem nilai budayanya.

Menurut Barth, kelompok etnik adalah kelompok orang-orang yang memiliki beberapa ciri. Pertama, kelompok tersebut mampu melestarikan diri dengan berkembang biak. Kedua, memiliki nilai-nilai budaya yang sama dan sadar akan rasa kebersamaannya. Ketiga, membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri. Keempat, menentukan ciri kelompoknya sendiri yang diterima kelompok lain dan dapat dibedakan dari kelompok lain.

Etnik tetap ada karena berkait dengan kebutuhan akan identitas. Meskipun ada kesamaan dengan etnik lain, hal itu tidak menghalangi mereka untuk merasa berbeda. Terkadang hal ini kontradiktif dengan ramalan para pemuja globalisasi. Justru, perkuatan identitas etnik lahir sebagai perlawanan atas globalisasi.

Etnik dijadikan alat politik untuk mendapatkan posisi tawar lebih tinggi dalam meraih sumber daya tertentu, misalnya ekonomi dan politik. Contoh terkini, tuntutan pengembalian kekuasaan adat dan berkembangnya isu putra daerah dalam era otonomi daerah. Juga penguasaan etnis lokal terhadap aset daerah sebagai hak, atau sengketa memperebutkan jabatan-jabatan politis.

Pola Pendekatan

Untuk memahami gejala etnisitas dalam konteks sosial politik dilakukan melalui beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan primordialisme dengan titik pandang secara khusus kepada pengelompokan etnis dalam faktor yang bersifat sosio-biologis. Seperti halnya wilayah, agama, adat, bahasa, dan organisasi sosial.

Kedua, konstruktivisme yang lebih berpandangan bahwa identitas etnis lahir dari sebuah proses dinamika sosial yang kompleks dan dalam jangka waktu panjang. Simbol-simbol dan berbagai atribut yang menjadi identitas etnis selalu berada dalam proses rekonstruksi, sesuai dengan tuntutan perubahan sosial.

Proses rekonstruksi simbol sering disalahgunakan untuk kepentingan politis. Pihak yang berkepentingan adalah para pemangku adat atau pihak yang

dihormati. Dinamika sosial terkadang dibentuk melalui wacana politik dengan maksud mencari keuntungan ekonomi/politik. Kerangka berpikir dikondisikan untuk menjatuhkan pilihan sesuai dengan pihak yang berkuasa di etnis tersebut.

Hanya etnis tertentu yang tidak terkontaminasi rekonstruksi sosial yang terkoordinasi dan dilakukan dengan sistematis. Salah satu contohnya adalah kaum Samin yang cenderung apolitis. Bahkan mereka berani melawan kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan nilai luhur dalam etnis mereka. Kaum Samin tidak terpengaruh rekonstruksi simbol dan kekuatan uang. Di sinilah letak kekhasan etnis Samin.

Sebagian etnis minoritas lokal, seperti Suku Dayak di Kalimantan, Suku Anak Dalam dan Kubu di pedalaman Riau dan Jambi, dan suku asli Papua, rentan dijadikan komoditas politik. Meskipun sebagian dari mereka apolitis, manipulasi politik terjadi dengan membenturkan isu eksistensi dan kehidupan ekonomi mereka.

Tatkala konflik etnis sudah menjadi tradisi, seperti etnis Madura dan Dayak di Kalimantan atau sentimen agama di Poso, maka letupan-letupan kecil akan berakibat fatal jika tidak diredam dengan cepat.

Politisasi etnis meskipun dalam skala kecil, misalnya di ranah lokal daerah dapat menciptakan biaya politik yang besar. Banyak contoh yang dapat dijadikan referensi dan bahan renungan betapa isu etnis sangat kontraproduktif bila dijadikan komoditas politik dalam pemilukada. Guna meredam cost yang lebih besar, seyogianya para politisi tidak tergoda menjadikan etnis sebagai alat politik dalam memburu kekuasaan. (Sumber: Lampung Post, 11 Juli 2012).

[Tentang penulis:](#)

[Robi Cahyadi Kurniawan, dosen FISIP Universitas Lampung](#)



Politik Nepotisme

Published Juni 28, 2012 Artikel Pengamat
Tag:Politik Nepotisme, Robi Cahyadi Kurniawan

Ditutup

Oleh Robi Cahyadi Kurniawan

Istilah nepotisme mencuat menjelang runtuhnya Orde Baru selama 1997—1998. Saat itu nepotisme dianggap sebagai penyakit politik bersama korupsi dan kolusi.

Kumpulan penyakit yang kemudian lebih terkenal dengan singkatan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) ini telah menggerogoti pemerintahan dan institusi politik. Berbeda dengan korupsi dan kolusi, saudara dekat mereka, yakni nepotisme, seakan tidak menjadi perhatian serius. Mungkin karena nepotisme tidak menimbulkan kerugian terlampau besar walaupun indikasi ke

sana cukup banyak. Melalui nepotisme terjalin jaringan yang erat sehingga tidak ada fungsi saling mengawasi dan berpotensi saling "memaafkan."

Wacana publik banyak dibanjiri informasi menyesatkan bahwa nepotisme tidak selamanya negatif. Artinya dalam nepotisme terdapat pula hal-hal positif sehingga nepotisme seolah-olah bisa dibenarkan. Pandangan ini mungkin berawal dari nepotisme dalam perusahaan privat yang bertujuan mencari keuntungan. Namun, ilmu ekonomi pun sebenarnya sudah mengingatkan nepotisme berdampak buruk bagi kinerja perusahaan.

Nepotisme Partai

Saat ini sedang hangat dibicarakan wacana draf RUU Pemilukada tentang pembatasan dalam kurun waktu tertentu bagi keluarga dekat atau garis kekerabatan langsung dari gubernur, bupati, dan wali kota untuk maju dalam pemilukada di wilayah yang sama. Draf RUU tersebut diartikan bahwa kepala daerah petahana (incumbent) tidak bisa digantikan calon yang memiliki kekerabatan langsung, seperti ayah turun ke anak, atau kakak dan adik, dalam satu garis keluarga. Hal ini bermula dari maraknya anggota keluarga yang masuk politik praktis tanpa melalui jenjang tertentu.

Jika dibandingkan Pemilu 2009, nepotisme di tubuh partai politik saat ini lebih mengkhawatirkan. Keadaan ini erat kaitannya dengan kondisi politisi senior yang memasuki usia uzur untuk memperebutkan jabatan-jabatan politis. Dengan kata lain, Pemilu 2014 merupakan kesempatan terakhir bagi mereka untuk bertarung. Penyebabnya, sistem kaderisasi dan rekrutmen di partai politik yang masih lemah. Pembibitan dan pemupukan kader baru partai yang nantinya akan diproyeksikan sebagai pengganti estafet kepemimpinan belum tertata. Proses kaderisasi partai di Tanah Air tidak seketat di negara-negara Eropa, misalnya.

Dalam Pemilu 2014 mendatang persaingan partai semakin ketat. Jalan pintas menarik suara pemilih adalah dengan memanfaatkan ketokohan dalam partai. Tokoh-tokoh partai yang mempunyai nama besar dan dikenal luas (minimal oleh konstituen partainya sendiri) menjadi daya pikat. Semua atribut ini biasanya berasal dari para petinggi partai.

Sadar akan kondisi tersebut, terjadi simbiosis mutualisme antara tokoh dan klan keluarga yang mencalonkan diri. Tokoh partai memiliki tujuan untuk kaderisasi dan melanjutkan target yang belum tercapai. Di sisi lain pihak keluarga memerlukan nama besar dan ketokohnya sebagai mesin pendulang suara pemilih. Ini berarti pencalonan dari klik/klan keluarga bukan berdasarkan faktor ideologi partai, melainkan lebih dipengaruhi pragmatisme tokoh.

Praktek semacam ini pasti mendapat penolakan keras dari kader internal partai. Terlebih jika mereka merasa telah bekerja keras untuk mencapai posisi puncak di struktural partai. Bahkan mereka telah jauh-jauh hari menggalang dukungan di tingkat akar rumput.

Respons negatif dan gejala ini jika tidak ditanggapi dengan bijak berpotensi merusak tatanan partai itu sendiri. Bukan tidak mungkin akan menimbulkan perpecahan internal partai. Bahkan, kader yang merasa "terzalimi" akan

membentuk partai tandingan. Artinya, keinginan untuk merampingkan jumlah partai akan terhambat.

Dinasti Politik

Alasan pembenar tokoh partai menerapkan pola kekeluargaan dalam jabatan politik, yaitu hal yang sama juga terjadi di negara-negara lain. Untuk Asia Tenggara, mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menggandeng istri serta anak perempuannya. Di Filipina kita mengenal keluarga Arroyo. Di India melekat dengan tradisi keluarga Nehru dan Gandhi. Sedangkan di Amerika Serikat tak terlepas dari kiprah keluarga Kennedy dan Bush.

Namun, proses menjadi politisi di Indonesia sering terjadi secara instan. Politisi bukan berasal dari proses alamiah, melainkan karena proses "karbitan." Untuk menjadi politisi sering hanya dengan bermodalkan uang, pengaruh, dan kedekatan dengan tokoh partai. Akhirnya, tujuan utama menjadi politisi bukan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat.

Partai-partai di negara maju tidak diisi politisi asal jadi. Latar belakang mereka dari kalangan cerdas pandai dengan fondasi ekonomi yang mapan. Artinya, motivasi utama terjun ke politik praktis tidak lagi persoalan menumpuk harta. Hal ini dipertegas lagi dengan perundangan yang mengatur anggota parlemen tidak diberi gaji serta tunjangan yang serbamewah.

Penyakit Kronis

Jika dibandingkan, cara berdemokrasi di Indonesia masih mencari bentuk. Perangkat demokrasi seperti partai politik, pemerintah, dan civil society belum berfungsi optimal dan sangat rentan disusupi nepotisme. Kelemahan lain, perundangan di Indonesia yang mengatur seleksi pejabat negara masih sangat umum dan gampang. Untuk menjadi anggota legislatif (DPR dan DPD) hanya memerlukan persyaratan yang sangat ringan. Misalnya, warga negara Indonesia, berbudi, berakhlak, memiliki jiwa Pancasila, tanpa dijabarkan secara konkret. Hendaknya kriteria dan standar prosedur yang baku sesegera mungkin direvisi.

Nepotisme politik jika ditimbang-timbang lagi tetaplah lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya. Jika perundangan politik belum menyentuh substansinya, sampai kapan pun nepotisme politik tetap menjadi penyakit kronis bersama dua saudara dekatnya; korupsi dan kolusi. (Sumber: Lampung Post, 26 Juni 2012).

Tentang penulis:

[Robi Cahyadi Kurniawan, dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung.](#)



Wacana Pemekaran Lampung

Published Juni 7, 2012 Artikel Pengamat

Ditutup

Tag:Robi Cahyadi Kurniawan, Wacana Pemekaran Lampung

Oleh Robi Cahyadi Kurniawan

Pada 25 Mei 2012, empat kabupaten menandatangani kesepakatan pembentukan provinsi baru sebagai pecahan dari Provinsi Lampung. Keempat kabupaten tersebut meliputi Lampung Utara, Lampung Barat, Way Kanan, dan Tulangbawang.

Dua kabupaten lain yang berpeluang untuk bergabung yakni Tulangbawang Barat dan Mesuji. Luas wilayah provinsi baru ini sesuai wilayah Lampung Utara sebelum pemekaran, yakni 1,75 juta hektare atau 52,4% dari luas wilayah Lampung saat ini. Luasnya wilayah eks Lampung tersebut menjadi salah satu dasar kuat rencana pemekaran.

Data Sekretariat DPR (2008) menunjukkan sejak Oktober 1999 sampai Juli 2008 telah terbentuk 169 daerah otonomi baru (DOB), meliputi tujuh provinsi baru, 139 kabupaten baru, dan 23 kota baru. Total permohonan DOB tahun 2012 ini mencapai 104 usulan dengan perincian 71 usulan DPR dan 33 inisiatif pemerintah. RUU yang menjadi prioritas adalah 19 DOB terdiri dari satu provinsi yakni Kalimantan Utara, satu kota yakni Sulawesi Tenggara, dan 17 kabupaten termasuk Kabupaten Pesisir Barat, Lampung.

Syarat DOB

Pembentukan daerah diatur dalam PP No. 78/2007 tentang Tata Cara Pembentukan Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Dalam Pasal 4 Ayat (1) disebutkan syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan adalah ukuran baku pemekaran provinsi. Sementara di Pasal 5 dijelaskan syarat administratif meliputi keputusan DPRD kabupaten/kota, keputusan bupati/wali kota, keputusan DPRD provinsi, keputusan gubernur, dan rekomendasi menteri.

Syarat teknis, dalam Pasal 6, meliputi faktor kemampuan ekonomi, potensi, sosial-budaya, sosial-politik, kependudukan, luas wilayah, pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah.

DOB akan direkomendasikan bila calon DOB dan daerah induk mempunyai total nilai seluruh indikator dan perolehan nilai indikator faktor kependudukan, kemampuan ekonomi, potensi, dan kemampuan keuangan dengan kategori sangat mampu atau mampu.

Syarat fisik kewilayahan dijelaskan di Pasal 7, meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibu kota, serta sarana-prasarana pemerintahan. Tata cara pembentukan DOB juga diterangkan dalam Bab 3 sehingga memerlukan waktu, persiapan, serta kajian yang lama untuk mewujudkan DOB. Keseriusan daerah juga diperketat dengan adanya 11 faktor dan 35 indikator yang nantinya diberi unsur penilaian kelayakan.

Pro-Kontra

Wacana pemekaran Provinsi Lampung segera menimbulkan pro-kontra. Pihak yang mendukung menyatakan pemekaran Lampung menjadi kebutuhan bersama agar daerah mendapat bagian dana yang sama dari pusat.

Pemekaran juga untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan akibat luasnya Provinsi Lampung dan didukung jumlah penduduk yang besar.

Pihak yang kontra berpendapat pemekaran tidak menjamin peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, sebab pada hakikatnya tugas pokok dan fungsi pemerintahan adalah mencakup pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan. Jangan sampai pemekaran hanya sebatas komoditas politik elite.

Alasan untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan dirasa kurang tepat karena otonomi daerah terfokus di kabupaten/kota. Alasan jauh dari pusat pemerintahan provinsi juga tidak relevan karena urusan dengan provinsi sangat jarang.

Pemekaran provinsi tidak terlalu mendesak, justru harus mengembangkan kabupaten/kota. Pihak yang kontra juga berpendapat pemekaran membuka peluang konflik baru, misalnya penentuan ibu kota provinsi yang baru serta konflik internal pada masyarakat.

Evaluasi Bappenas-UNDP

Hasil evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan United Nation Development Program (UNDP) Juli 2008 menyimpulkan pelaksanaan otonomi perlu beberapa perbaikan. Sebelum pemekaran, perlu mempersiapkan aparatur dan infrastruktur.

Tidak kalah penting, pembagian potensi ekonomi yang merata agar DOB dapat sebanding dengan daerah induk. Rencana jangka pendek sebelum pemekaran dilakukan dengan mengubah pola belanja aparatur dan pembangunan. Setelah pemekaran berjalan lima tahun, perlu dievaluasi apakah daerah baru masih tertinggal atau mampu berdiri sendiri.

Studi tersebut menyimpulkan pelayanan publik DOB belum optimal akibat tidak efektifnya penggunaan dana, tidak tersedianya tenaga layanan publik, dan belum optimalnya pemanfaatan pelayanan publik. Kinerja aparatur juga rendah terlihat dari ketidaksesuaian antara aparatur yang dibutuhkan dan yang tersedia, kualitas aparatur yang rendah, dan aparatur bekerja dalam kondisi keterbatasan sarana dan prasarana.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi, DOB lebih fluktuatif dibandingkan daerah induk yang relatif stabil. Sementara dari aspek keuangan, kinerja DOB kurang optimal akibat kebergantungan fiskal dan hal ini terkait dengan besarnya alokasi belanja modal di DOB, rendahnya pemasukan dari pendapatan asli daerah dan kontribusi ekonomi lainnya. Faktor-faktor tersebut mengindikasikan belum efektifnya kebijakan keuangan DOB dalam menggerakkan aktivitas ekonomi baik yang bersifat konsumtif maupun investasi.

Persiapan Matang

Dalam hal pengentasan kemiskinan, kemampuan DOB belum dapat mengejar daerah induk. Tinjauan dari sisi ekonomi, ketertinggalan DOB dari daerah induk pada umumnya disebabkan keterbatasan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Pemekaran daerah hendaknya disikapi secara berhati-hati. Persiapan yang memadai bagi calon DOB mutlak diperlukan. Perlu waktu lama untuk menyiapkan pengalihan aparatur, fasilitas pemerintahan, infrastruktur perekonomian, dan infrastruktur penunjang lainnya.

Pembagian sumber daya yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan infrastruktur antara daerah induk dan DOB perlu diatur dengan baik. Perekonomian DOB sebaiknya diarahkan untuk mendukung sektor utama, misalnya pertanian dalam arti luas, baik ketersediaan infrastruktur penunjang maupun tenaga penyuluh lapangan. (Sumber: Lampung Post, 06 Juni 2012).

Tentang penulis:

[Robi Cahyadi Kurniawan, dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung.](#)



Karikatur.Perempuan di Pilpres 2014

Published Mei 31, 2012 Artikel Pengamat

Ditutup

Tag: Karikatur Perempuan di Pilpres 2014, Robi Cahyadi Kurniawan

Oleh **Robi Cahyadi Kurniawan**

Adu wacana menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 mulai gencar. Opini terbaru yang menimbulkan pro-kontra adalah upaya mengusung Ani Yudhonono sebagai calon presiden.

Pihak pendukung berpendapat setiap warga negara berhak terlibat dalam proses politik tanpa melihat gender. Pihak yang tak sepakat memakai draf RUU Pemilihan Kepala Daerah dalam Pasal 12 poin p tentang persyaratan sebagai calon gubernur: "Tidak mempunyai ikatan perkawinan, garis keturunan lurus ke atas, ke bawah, dan ke samping dengan gubernur, kecuali ada selang waktu minimal satu masa jabatan."

Hal sama juga dipertegas dalam Pasal 70 poin p tentang persyaratan calon bupati/wali kota: "Tidak mempunyai ikatan perkawinan, garis keturunan lurus ke atas, ke bawah, dan ke samping dengan gubernur dan bupati/wali kota kecuali ada selang waktu minimal satu masa jabatan."

Pihak yang menolak pencalonan Ani Yudhoyono mempertanyakan kalau dalam pemilihan lokal saja primordialisme (dinasti politik) dilarang, mengapa dalam Pilpres diperbolehkan?

Lahirnya poin p dalam draf RUU Pilkada didasarkan pada evaluasi bahwa ikatan keluarga atau primordialisme politik sangat kental terjadi dan menjadi faktor penting kemenangan pilkada. Keterlibatan perempuan dalam kancah politik lokal tak lepas dari primordialisme tersebut.

Perempuan Berpolitik

Pilkada di daerah-daerah dengan ciri khas masing-masing telah melahirkan pemimpin perempuan. Untuk level provinsi diwakili Ratu Atut Chosiyah yang menjabat gubernur Banten (2007—2012 dan 2012—2017). Untuk wali kota

diwakili Suryatati A. Manan yang menjabat bupati Tanjungpinang (2008—2013).

Selain itu, ada sejumlah perempuan yang sedang dan pernah menjabat kepala daerah, di antaranya Bupati Karanganyar Rina Iriani, Bupati Banyuwangi Ratna Ani, Bupati Bolaang Mongondow Marlina Moha, Bupati Tuban Heni Relawaty, Bupati Nganjuk Siti Nurhayati, Bupati Majalengka Tuty Hayatip, Bupati Kebumen yang kini menjabat wakil gubernur Jawa Tengah Rustriningsih, dan Bupati Minahasa Tenggara Telly Tjanggalung.

Pemimpin perempuan lainnya Bupati Tabanan Bali Ni Putu Eka Wiryastuti, Bupati Bantul Sri Surya Widati, Bupati Tangerang Selatan Airin Rachmi, Wali Kota Tebingtinggi Rohani Darus Daniel, dan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widayari.

Beberapa nama di atas merupakan keterwakilan dari perempuan dalam perebutan jabatan politik melalui pilkada. Jumlah itu masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah kepala daerah yang didominasi kaum laki-laki.

Pilpres dua periode terakhir hanya menempatkan Megawati sebagai satu-satunya calon presiden dari kaum hawa. Titik awal pemimpin muda pada periode 2014 dapat dijadikan test case pertama bagi calon-calon pemimpin wanita di negeri ini. Keterwakilan perempuan dalam perebutan jabatan eksekutif berbanding terbalik dengan peluang dan jatah 30% bagi perempuan untuk duduk di legislatif.

Nama-nama yang mulai dimunculkan dalam Pilpres 2014 belum sebanyak calon laki-laki. Selain Megawati, nama Puan Maharani, Sri Mulyani, dan putri-putri lain dari Presiden Soekarno dan Soeharto turut meramaikan bursa pencalonan.

Faktor Penyebab

Timbul pertanyaan kemudian mengapa keran pemimpin perempuan di Indonesia macet? Ben Agger (2003) dalam bingkai teori psikologi sosial berbicara mengenai konsep diri pribadi dan hubungan interpersonal. Perempuan cenderung untuk menempatkan dan memosisikan diri di bawah laki-laki (inferior). Korelasinya hubungan interpersonal yang dibentuk selalu mengedepankan kepentingan lelaki.

Perempuan juga memiliki kodrat alamiah mengasuh keluarga. Beban mengatur rumah tangga dan mengurus anak dalam konsep ketimuran selalu menjadi tanggung jawab perempuan. Di lain pihak, pola berpikir kaum laki-laki, sejak berabad-abad silam masih menganggap perempuan sebagai subordinat dan menyudutkan perannya melalui doktrin adat, budaya, dan agama.

Walaupun peraturan perundangan sudah mengakomodasi peran perempuan dalam politik, kondisi ini belum mampu mengubah realitas peran perempuan dalam lembaga politik. Kendala perjuangan untuk menempatkan representasi dan peran politiknya dalam lembaga-lembaga politik disebabkan ketidaksiapan perempuan memasuki dunia politik, kompetisi internal partai politik, dan kompetisi di antara perempuan itu sendiri.

Faktor eksternal menjadi kendala lain seperti budaya patriarkat yang menempatkan laki-laki pada posisi yang lebih dominan dan masih banyaknya

dianut paradigma bahwa dunia politik adalah kotor dan hanya cocok untuk laki-laki.

Peluang Perempuan

Dalam Pilpres 2014, peluang perempuan sama besarnya dengan laki-laki. Tiga modal dasar yakni modal politik, sosial, dan finansial masih menjadi faktor utama kemenangan. Menurut hemat penulis, peran penunjang tidak terlepas dari, pertama, ditentukan profil kandidat itu sendiri, jaringan, dan kekuatan keluarga. Kecantikan kadang bisa menjadi bahan pertimbangan selain kemampuan dan kecerdasannya. Jaringan serta keluarga besar juga jadi alasan pemilih untuk menjatuhkan pilihannya.

Kedua, peran media massa. Media massa bisa menggiring masyarakat untuk memilih pemimpin perempuan yang dianggap punya kemampuan dan berpeluang menang. Ketiga, tokoh masyarakat dan ulama untuk menepis anggapan bahwa perempuan tak boleh menjadi pemimpin. Lebih arif bila para tokoh bisa menjelaskan posisi perempuan dalam kehidupan sosial.

Keempat, peran partai politik pengusung. Seberapa jauh mesin partai mengondisikan terpilihnya calon perempuan dan bagaimana partai menjelaskan program yang relevan bagi masyarakat. (Sumber: Lampung Post, 29 Mei 2012).

[Tentang penulis:](#)

[Robi Cahyadi Kurniawan, Dosen FISIP Universitas Lampung.](#)



Agenda Politik 2014

Published Mei 17, 2012 Artikel Pengamat

Ditutup

Tag:Agenda Politik 2014, Robi Cahyadi Kurniawan

Oleh Robi Cahyadi Kurniawan

Pemilihan Umum 2014 jika dilihat dari waktu memang masih jauh untuk dicermati. Tetapi, falsafah pemenang adalah yang mempersiapkan segala sesuatu jauh hari dan secermat mungkin.

Berangkat dari falsafah itulah kiranya tulisan ini dibuat, dalam rangka menilik proses politik menuju 2014. Gambaran umum Indonesia saat ini adalah APBN terbebani bunga utang dan pokok utang sehingga kita tidak dapat menjadi negara yang berdikari, termasuk dalam pemilihan presiden. Campur tangan asing, khususnya Amerika Serikat dalam agenda 2014 dapat dipastikan terjadi. Kuatnya cengkeraman globalisasi dan lingkungan internasional, seperti Bank Dunia dan IMF, memperkuat kondisi tersebut.

Isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) awal April 2012, membawa dampak ekonomi, sosial, dan politik Indonesia dengan kondisi pembatasan BBM saat ini akan berdampak pada popularitas calon. Anjloknya popularitas Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Partai Demokrat serta stagnasi

popularitas partai lain dan calon lain berdasar riset LSI, bisa menjadi rujukan awal. Bursa tokoh-tokoh tua yang masih ingin bertarung, seperti Megawati, Aburizal Bakrie, Prabowo Subianto, Wiranto, Sri Sultan Hamengkubuwono X, bergulir bersamaan dengan resistensi publik terhadap tokoh-tokoh muda, seperti Anas Urbaningrum, Muhaimin Iskandar, Puan Maharani, dan lainnya.

Evaluasi Regulasi

Evaluasi pertama, adalah melihat permasalahan Pemilu 2009 dan pemilihan kepala daerah sampai dengan periode 2012 ini. Regulasi dan peraturan pelaksanaan pemilu serta penyelenggaraan tahapan yang kurang tepat. Masalah data pemilih yang belum akurat, distribusi logistik yang kurang tepat waktu dan sasaran. Ditambah pendidikan pemilih yang masih terbatas dan kurang tepat waktu sehingga angka golput melonjak. Secara keseluruhan, permasalahan tersebut membawa dampak pada kualitas penyelenggaraan pemilu.

Antisipasi dan tindaklanjut dari sejumlah aspirasi dan wacana yang berkembang secara luas mengenai pemilihan kepala daerah, yang selama ini dilakukan secara langsung di semua tingkat pemerintahan daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota.

Masih dilihat dan perlu dilakukan pengkajian yang sungguh-sungguh mengenai pemilihan gubernur yang dilakukan secara langsung oleh rakyat atau dipilih melalui DPRD. Selain itu, perlu pula dilakukan pengkajian yang lebih mendalam mengenai wacana pemisahan pemilihan kepala daerah dari materi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Evaluasi kedua, selain kajian diatas, juga menyangkut pelaksanaan pemilu apakah bersamaan atau tidak, yakni wacana hanya dua kali saja, yakni eksekutif (presiden, gubernur, bupati/wali kota) dan legislatif (DPR, DPRD Provinsi, DPRD kota/kabupaten)

Partai Politik

Apa yang terjadi pada partai politik di Indonesia? Pembatasan jumlah parpol melalui parliamentary threshold (PT) 3,5% yang tertuang dalam UU Pemilu terbaru, mungkin masih akan diperdebatkan dalam judicial review di ranah Mahkamah Konstitusi. PT tidak menjamin kualitas parpol melonjak, tetapi hanya membatasi jumlah parpol. Partisipasi politik rakyat untuk berorganisasi di partai politik belum diikuti kinerja parpol yang optimal dalam melaksanakan fungsi-fungsi utama parpol, seperti agregasi dan artikulasi politik, komunikasi politik, dan pendidikan politik.

Parpol pun menghadapi beberapa persoalan organisasi, seperti konflik internal dalam pergantian kepengurusan. Masalah lain, belum optimalnya proses kaderisasi dan mekanisme rekrutmen, lemahnya kemampuan dan kapasitas kader dan fungsionaris partai dalam membangun dan mempraktekkan dasar-dasar demokrasi. Ditunjang dengan lemahnya sistem demokrasi internal dalam parpol. Dampak dari kinerja yang belum optimal adalah lemahnya kepercayaan publik terhadap parpol.

Struktur perundangan sudah mengakomodasi peningkatan peranan perempuan dalam politik, khususnya dalam parpol. Kondisi ini belum mampu

mengubah realitas peran perempuan dalam lembaga-lembaga politik. Kendala perjuangan untuk menempatkan representasi dan peran politiknya dalam lembaga-lembaga politik disebabkan oleh ketidaksiapan perempuan untuk memasuki dunia politik, kompetisi internal partai politik, dan kompetisi di antara perempuan itu sendiri.

Faktor eksternal menjadi kendala lain, seperti budaya patriarkat yang menempatkan laki-laki pada posisi yang lebih dominan dan masih banyaknya paradigma bahwa dunia politik adalah kotor dan hanya cocok untuk laki-laki. Perempuan juga masih belum dianggap sebagai kelompok yang berhak memiliki peran independen dalam melakukan aktualisasi diri di bidang sosial dan politik. Serta belum memiliki akses yang sama ke dalam sumber-sumber pengetahuan dan pendidikan.

Masyarakat Sipil

Peran masyarakat sipil dalam Pemilu 2014 cukup terbuka guna memberikan masukan, kritikan, dan evaluasi terhadap proses demokrasi ke depan. Permasalahannya adalah organisasi masyarakat sipil (OMS) belum cukup terlibat dalam penyusunan kebijakan publik dan melakukan pengawasan kepada penyelenggara negara, khususnya pengawasan terhadap pemilu. Kegiatan organisasi masih bersifat kasuistik dan sporadis, serta tidak berkelanjutan.

Kinerja yang lemah itu disebabkan; pertama, lemahnya manajemen pengelolaan organisasi termasuk kurang melakukan kaderisasi dan pengelolaan SDM yang tepat, serta belum memiliki jaringan yang luas di kalangan masyarakat sipil. Kedua, rendahnya akses organisasi terhadap informasi.

Ketiga, minimnya dukungan prasarana, pelatihan, permodalan, serta akses distribusi, dan pemasaran pada proses pengembangan unit-unit produksi OMS. Keempat, keterbatasan proses pertukaran gagasan, pengalaman, dan pembelajaran antarorganisasi masyarakat dan antarwilayah karena keterbatasan mobilitas mereka. Hal lain, OMS tidak terbebas pula dari persoalan tidak transparan dan korupsi.

Agenda politik 2014, meliputi beragam aspek dalam masyarakat, politisi, parpol, masyarakat sipil, pasar, ekonomi lokal, dan global sampai dengan pencitraan politik. Pengawasan yang ketat harus dilakukan semua pihak agar misi 2014 tidak menghancurkan kualitas demokrasi yang sudah dibangun sejak era transisi demokrasi tahun 1999. (Sumber: Lampung Post, 13 Mei 2012).

Tentang penulis:

[Robi Cahyadi Kurniawan, dosen FISIP Universitas Lampung](#)



